

EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN PANDAK BANTUL

EFFECTIVENESS OF THE PROGRAM KELUARGA HARAPAN IN PANDAK DISTRICT BANTUL

Oleh: Urika Tri Astari dan Argo Pambudi, M.Si., FIS, UNY
urikatri@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan pemerintah berupa Program Keluarga Harapan serta mengetahui keefektifan program tersebut dalam upaya menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Pandak. Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Pandak tidak efektif dilihat dari indikator yang dikemukakan oleh Sutrisno yaitu Pemahaman Program, Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tercapainya Tujuan dan Perubahan Nyata. Terdapat empat faktor yang menghambat keefektifan dari Program Keluarga Harapan yaitu: 1) kurangnya dana untuk memberikan sarana dan prasarana pendukung bagi pelaksana PKH, 2) terbatasnya jumlah pendamping PKH, 3) Tidak adanya mekanisme maupun aturan yang mengharuskan pelaporan penggunaan dana bantuan oleh peserta PKH, dan 4) kepatuhan peserta PKH yang semakin menurun dalam memenuhi kewajiban sesuai aturan program.

Kata Kunci: Efektivitas, Program Keluarga Harapan, Kemiskinan

ABSTRACT

This study aimed to describe and analyze government policies in the form of Program Keluarga Harapan and to know the effectiveness of the program in the effort to overcome poverty in Pandak sub-district. The research design used was descriptive with qualitative approach. The results of this study indicated that the Program Keluarga Harapan in poverty reduction efforts in Pandak sub-district was not effective, it could be seen from the indicators proposed by Sutrisno that was Understanding Program, Right Target, Timely, Achievement of Objectives and Real Changes. There were four factors that inhibited the effectiveness of the Program Keluarga Harapan: 1) the lack of funds to provide supporting facilities and infrastructure for PKH implementers, 2) the limited number of PKH facilitators, 3) there were no mechanisms or rules that were requiring the PKH participants to report their use of funds, and 4) the decreasing of PKH participants' compliance in fulfilling obligations according to program rules.

Keywords: Effectiveness of Program, Program Keluarga Harapan, Poverty

PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi sebuah permasalahan masyarakat Indonesia yang belum dapat terselesaikan dan masih menjadi beban pemerintah. Emil Salim (dalam Supriana, 1997:82) mengemukakan karakteristik penduduk miskin. Kelima karakteristik penduduk tersebut adalah: 1) tidak memiliki faktor produksi sendiri; 2) tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh asset produksi dengan kekuatan sendiri; 3) tingkat pendidikan pada umumnya rendah; 4) banyak di antara mereka yang tidak mempunyai fasilitas; 5) diantara mereka berusia relatif muda dan tidak mempunyai keterampilan atau pendidikan yang memadai.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, kemiskinan ditandai dengan munculnya masyarakat miskin lemah yang tidak memiliki kemampuan dalam berusaha serta mempunyai akses yang terbatas pada kegiatan sosial ekonomi. Sebagai negara berkembang, jumlah kemiskinan di Indonesia sampai sekarang masih sangat tinggi.

Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, pemerintah sebagai *policy maker* mengeluarkan berbagai kebijakan berupa program sosial yang dapat meringankan dan membantu rumah tangga sangat miskin dalam hal

mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar. Program kebijakan tersebut diantaranya adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Langsung Sementara (BLSM), Inpres Data Tertinggal (IDT), dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Namun pada kenyataannya kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah dirasa masih kurang efektif dalam menanggulangi kemiskinan yang ada di Indonesia.

Menurut Remi dan Tjiptoherijanto (2002:32), program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan mendapatkan kritik antara lain tentang transparansi program, dana yang kebanyakan tidak diterima oleh kelompok yang ditargetkan. Program tersebut masih merupakan kebijakan yang terpusat dan memposisikan masyarakat sebagai objek dalam keseluruhan proses. Pemerintah selaku *policy maker* selalu berupaya menyempurnakan berbagai kebijakan dan program untuk menurunkan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Program penanggulangan kemiskinan dengan basis bantuan sosial yang merupakan hal baru di Indonesia adalah program pemberian bantuan dana bersyarat atau lebih dikenal dengan *Conditional Cash Transfer* (CCT) yang diadopsi dari berbagai negara sebagai

strategi program bantuan sosial guna penanggulangan kemiskinan.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTSM diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program ini, dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban RTSM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan. Pelaksanaan PKH juga mendukung upaya pencapaian *Millenium Development Goals* (MDGs) yang sekarang menjadi *Sustainable Developments Goals* (SDGs). Lima komponen SDGs yang akan terbantu oleh Program Keluarga Harapan, yaitu: (a) Pengurangan penduduk miskin; (b) Pendidikan Dasar; (c) Kesenjangan Gender; (d) Pengurangan angka kematian pada bayi dan balita; (e) Pengurangan kematian pada ibu melahirkan. (pada situs <http://www.tnp2k.go.id/id/tanyajawab/klaster-i/program-keluarga-harapan-pkh/> diakses pada tanggal 23 November 2017).

Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bantul sudah dijalankan sejak tahun 2008, namun dampak program tersebut belum sepenuhnya dapat mengurangi kemiskinan masyarakat. Hal

ini dapat diketahui bahwa hingga tahun 2015 angka kemiskinan masyarakat di Kabupaten Bantul masih sangat tinggi. Disamping masalah kemiskinan masih menjadi permasalahan yang sulit diberantas di DIY khususnya di Kecamatan Pandak, dalam pelaksanaan PKH juga masih ditemukan berbagai permasalahan. Beberapa permasalahan yang terjadi diantaranya adalah tujuan dari Program Keluarga Harapan tersebut belum terealisasi dengan baik. Permasalahan ketidaktepatan sasaran dalam Program Keluarga Harapan banyak terjadi di Kecamatan Pandak.

Dalam mengukur tingkat keefektifan Program Keluarga Harapan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Pandak menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Sutrisno, yaitu: Pemahaman Program, Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tercapainya Tujuan dan Perubahan Nyata. Menurut Sedarmayanti (2001:59) efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi pada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas, maka akan terjadi peningkatan efektivitas walaupun belum tentu efisien.

Menurut pendapat Mahmudi (2005: 92) efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Sedangkan menurut pendapat P. Robbins Stephen (2010:8) efektivitas adalah menjalankan aktivitas-aktivitas yang secara langsung membantu organisasi mencapai berbagai sasaran. Efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada 12 Februari 2018 hingga 2 April 2018.

Subjek Penelitian

Kasie Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Kasie Kemasyarakatan Kecamatan Pandak. Koordinator Pendamping PKH Kecamatan Pandak. Kepala Dukuh

Ngaran, Desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak. Masyarakat penerima bantuan PKH.

Instrumen Penelitian

Instumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri atau dapat dikatakan peneliti sebagai alat pengumpul data utama. Sedangkan yang diuji dalam penelitian ini adalah datanya.

Sumber Data

Data primer merupakan data yang didapat melalui wawancara dan pengamatan langsung terhadap subyek penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh dari beberapa dokumentasi yang terkait dengan efektivitas Program Keluarga Harapan di Kecamatan Pandak.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara pada penelitian ini menggunakan pertanyaan terbuka, namun ada batasan dan alur pembicaraan serta ada pedoman wawancara yang digunakan sebagai kontrol untuk menggiring pertanyaan yang semakin melebar.

2. Observasi

Bentuk observasi yang peneliti lakukan dalam penelitian ini antara lain melakukan pengamatan pelaksanaan PKH di Dinas Sosial Kabupaten Bantul, Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul, PPKH Kecamatan Pandak, masyarakat penerima bantuan PKH.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan media dokumentasi yang berupa data jumlah penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul. Dokumentasi ini diperoleh dari Pendamping PKH Kecamatan Pandak, Dinas Sosial Kabupaten Bantul dan BPS Kabupaten Bantul.

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2011:246).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas Program Keluarga Harapan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Pandak yang diukur menggunakan 5 indikator yang dikemukakan oleh Sutrisno (2007:125), yaitu pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata.

Pemahaman Program

Pemahaman program merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pengetahuan masyarakat

terhadap Program Keluarga Harapan. Pemahaman program kepada masyarakat dapat dilakukan dengan kegiatan sosialisasi. Hal ini juga disampaikan dalam teori yang dikemukakan oleh Budiani (2007:53) bahwa untuk mengukur efektivitas program dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu indikatornya adalah Sosialisasi Program. Hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam kegiatan sosialisasi yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.

Sosialisasi Program Keluarga Harapan dilakukan secara rutin setahun sekali oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul dengan mengundang pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan PKH seperti Puskesmas, Pendidikan, Dukuh, Camat serta Pendamping PKH. Tujuan dilakukannya kegiatan ini untuk memonitoring kinerja Pendamping PKH. Setelah diadakan sosialisai, para *stakeholderss* yang terkait dalam PKH melakukan koordinasi maupun evaluasi sehingga apabila terdapat permasalahan-permasalahan di masyarakat yang sulit untuk diselesaikan pihak Dinas Sosial Kabupaten Bantul dapat membantu untuk menyelesaikan.

Selain itu, sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Kartika Febri Yuliani (2017) tentang Efektivitas Program Pelayanan Kesehatan Gratis (P2KM) di Kota Bandar Lampung bahwa sosialisasi program dilaksanakan dengan baik oleh pelaksana P2KM. Dalam melakukan sosialisasi ini melibatkan Pemerintah Kabupaten, Dinas Kesehatan Kabupaten, beberapa Puskesmas dan Masyarakat penerima Program Pelayanan Kesehatan Gratis.

Pendamping PKH melakukan kegiatan sosialisasi maupun pertemuan dengan masyarakat penerima PKH rutin sebulan sekali. Hal ini dilakukan dengan cara pembentukan beberapa kelompok berdasarkan wilayah. Kelompok ini terdiri dari 10-30 orang dan ditunjuk satu orang untuk menjadi ketua kelompok agar memudahkan pendamping dalam koordinasi. Tujuan dilakukan kegiatan ini untuk memonitoring komitmen dari peserta PKH, apabila ada pelanggaran maka pendamping akan melaporkan ke pihak Bank sehingga peserta PKH yang melanggar komitmen akan dibekukan uangnya sebagai sanksi. Selain itu, kegiatan ini juga menjadikan sarana masyarakat untuk mengadakan atau menyampaikan berbagai keluhan maupun permasalahan terkait pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

Kegiatan sosialisasi ini biasa dilakukan di tiap Desa di wilayah Kecamatan Pandak. Untuk melakukan kegiatan sosialisasi pendamping PKH mengundang masyarakat penerima bantuan PKH melalui Kepala Dukuh setempat. Dengan melalui Kepala Dukuh diharapkan agar Pendamping PKH mendapatkan informasi yang sesungguhnya mengenai masyarakat penerima PKH, mengingat Kepala Dukuh merupakan aparat desa yang paling dekat dengan masyarakat.

Indikator pemahaman program ini tidak hanya mencakup sosialisasi program, akan tetapi dalam kegiatan pemahaman program terdapat diskusi maupun *sharing* antara pendamping PKH dengan penerima bantuan PKH. Hal ini akan memudahkan masyarakat penerima bantuan untuk berkomunikasi dengan pendamping PKH. Komunikasi yang dilakukan mencakup pengaduan, keluhan maupun permasalahan yang dialami oleh penerima bantuan PKH. Dengan adanya kegiatan ini, masyarakat dapat terbuka terhadap pendamping PKH terkait permasalahan yang dihadapi selama menjadi peserta PKH. Hal ini juga memudahkan pendamping PKH untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di lapangan.

Dalam indikator pemahaman program ini, sosialisasi maupun komunikasi mengenai Program Keluarga

Harapan dapat berjalan dengan baik. Masyarakat mampu memahami apa itu PKH, hak dan kewajiban serta sanksi-sanksi bagi penerima PKH. Dengan kegiatan rutin pertemuan kelompok setiap bulan, dapat memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi serta menjalin kedekatan terhadap pendamping PKH. Sehingga dengan demikian, indikator pemahaman program ini dapat dikatakan efektif untuk Program Keluarga Harapan di Kecamatan Pandak.

Tepat Sasaran

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan atau program, ketepatan sasaran sangatlah diperlukan. Hal ini juga didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Budiani (2007: 53) bahwa ketepatan sasaran program dilihat dari sejauhmana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Secara umum, sasaran memiliki pengertian yaitu, segala sesuatu yang dicapai dan dihasilkan oleh instansi atau pihak tertentu dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Sasaran merupakan faktor penting dalam proses pelaksanaan kegiatan/program, karena memberikan ukuran berhasil atau tidaknya suatu kegiatan/program yang telah dilaksanakan. Sasaran dari Program Keluarga Harapan adalah peserta PKH yang sudah dinyatakan lolos sebagai penerima bantuan PKH.

Berdasarkan penelitian dari Kartika Febri Yuliani (2017) tentang Efektivitas Program Pelayanan Kesehatan Gratis (P2KM) di Kota Bandar Lampung bahwa indikator ketepatan sasaran program menunjukkan sudah tepat sasaran sesuai dengan peserta program yang telah ditentukan sebelumnya. Strategi dalam ketepatan sasaran dalam program ini adalah penentu sasaran ditetapkan secara individu maupun organisasi pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat seperti RT, RW, Padukuhan dan Desa. Sehingga mengetahui kondisi masyarakat yang sebenarnya maka ketidaktepatan sasaran bisa dihindari.

Berbeda dengan hasil penelitian ini bahwa dalam penelitian ini diperoleh informasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan terdapat penyimpangan yaitu adanya masyarakat yang dulunya menjadi peserta PKH namun sekarang kondisinya sudah membaik bahkan mapan secara ekonomi tetapi masih terdaftar sebagai peserta PKH. Terkait hal ini, pendamping PKH maupun dari Dinas Sosial tidak bisa menghapuskan data tersebut sebagai peserta PKH karena data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang kemudian diolah oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) lalu diserahkan kepada Kementerian Sosial, sehingga pendamping maupun Dinas Sosial tidak memiliki

kewenangan untuk menghapus atau mengeluarkan peserta PKH. Dengan adanya kasus seperti ini, pendamping hanya bisa melakukan motivasi kepada peserta PKH yang seharusnya tidak mendapatkan bantuan untuk mengundurkan diri dengan mengisi form yang telah disediakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

Kejadian ini juga berlaku bagi sebaliknya, yaitu apabila masyarakat miskin yang memenuhi syarat sebagai penerima bantuan PKH namun tidak mendapatkan bantuan maka Pendamping maupun Dinas Sosial juga tidak bisa berbuat banyak. Apabila terjadi kasus seperti ini, maka pendamping hanya bisa memberikan pengertian untuk bersabar agar datanya dapat tercatat di BPS sehingga bisa diolah oleh TNP2K untuk menjadi calon peserta PKH.

Permasalahan ketidaktepatan sasaran ini memang sulit untuk diselesaikan karena data yang diberikan kepada pendamping PKH berasal dari pusat dan sulit untuk menghapus atau menambah peserta PKH bahkan apabila dilakukan substitusi atau digantikan dengan masyarakat yang layak menjadi peserta PKH pun tidak bisa. Hal ini dikarenakan dari pusat sudah memberikan data *by name* dan *by address* kepada pendamping sehingga pendamping hanya memproses

data sesuai dengan nama dan alamat yang tertera.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa ketepatan sasaran dalam Program Keluarga Harapan di Kecamatan Pandak masih terdapat permasalahan sehingga indikator tepat sasaran dikatakan tidak efektif.

Tepat Waktu

Ketepatan waktu dalam pencairan bantuan PKH sangat diperlukan, mengingat bantuan sosial yang diberikan setiap tiga bulan sekali, kepada masing-masing peserta PKH. Pencairan dana PKH dilakukan dengan mengirimkan uang dari pihak Bank ke rekening masing-masing peserta PKH, sehingga peserta PKH dapat mengambil uangnya sendiri di ATM. Ketepatan waktu dalam pencairan dana bantuan PKH sangat penting, mengingat pencairan dana bantuan sosial harus sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditentukan. Masing-masing *stakeholders* harus menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan, sehingga dalam pencairan bantuan sosial, khususnya Program Keluarga Harapan dapat tersalurkan tepat waktu. Peran dari masing-masing *stakeholders* memiliki keterlibatan dalam pelaksanaan PKH agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Pencairan bantuan PKH di Kecamatan Pandak belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan laporan dari

pendamping ke pusat sering mengalami keterlambatan. Sehingga pihak Bank juga mengalami keterlambatan dalam mencairkan bantuan PKH kepada penerima bantuan. Keterlambatan laporan dari pendamping ke pusat ini dikarenakan jumlah pendamping PKH masih sangat minim sehingga beban kerja terlalu banyak. Keterlambatan pencairan dana sering terjadi pada tahap pertama hingga tahap ketiga, sedangkan pada tahap keempat relatif stabil pencairan dana bantuan pada awal bulan.

Dengan adanya permasalahan seperti ini, banyak dari masyarakat yang tidak terima apabila terjadi kemoloran pencairan dana bantuan. Hal ini menyebabkan penambahan tugas dan beban bagi pendamping agar dapat menjelaskan kepada masyarakat yang mengalami keterlambatan dalam menerima bantuan PKH untuk bersabar. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan indikator tepat waktu, Program Keluarga Harapan di Kecamatan Pandak dapat dikatakan tidak efektif.

Tercapainya Tujuan

Tujuan merupakan capaian dari suatu sasaran dan target yang diselenggarakan melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan, sehingga memberikan arahan terkait sasaran yang ingin dicapai. Hal ini juga disampaikan dalam teori yang dikemukakan oleh

Budiani (2007:53) bahwa tujuan program dapat dilihat dari sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Tercapainya suatu tujuan, dapat dilihat berdasarkan perbandingan antara *input* dan *output* yang dihasilkan. Tujuan dari Program Keluarga Harapan adalah meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya kualitas hidup Keluarga Miskin. PKH diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam jangka pendek serta memutus rantai kemiskinan dalam jangka panjang.

Indikator tercapainya tujuan ini juga dapat dilihat dari kinerja implementor dari Program Keluarga Harapan. Hal ini dikarenakan implementor PKH khususnya pendamping PKH sangat menentukan ketercapaian tujuan dari Program Keluarga Harapan. Pendamping PKH dituntut untuk terbuka dan tidak mengambil hak dari peserta PKH. Pendamping PKH juga memiliki tugas untuk membuat sebuah laporan dimana isi dari laporan tersebut salah satunya merupakan hasil dari PKH sudah terlaksana sesuai dengan tujuannya atau tidak.

Laporan pertanggungjawaban dari pelaksana merupakan salah satu instrumen yang bisa digunakan untuk menilai

indikator ini efektif atau tidak. Selama pelaksanaan PKH, para pelaksana program mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap perjalanan pelaksanaan PKH. Masing-masing pelaksana pada tiap level mempunyai kewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawabannya. Setiap pendamping mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada UPPKH Kabupaten. Sedangkan UPPKH Kabupaten mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada UPPKH Pusat.

Berdasarkan hasil penelitian selama di lapangan ditemukan informasi bahwa selama pelaksanaan PKH di Kecamatan Pandak, masyarakat peserta PKH telah dapat menerima haknya berupa bantuan uang tunai sehingga dapat ditegaskan bahwa Program Keluarga Harapan di Kecamatan Pandak sudah berjalan sesuai dengan tujuannya dan tidak diliputi dengan penyimpangan terhadap hak-hak yang seharusnya diterima peserta PKH. Hal ini disebabkan karena peserta PKH telah memperoleh bantuan keuangan secara utuh tanpa adanya potongan yang dilakukan oleh para pelaksana program. Sehingga pelaksanaan PKH di Kecamatan Pandak dapat dikatakan efektif dari sisi ketercapaian tujuan pelaksanaan program.

Perubahan Nyata

Perubahan nyata merupakan suatu bentuk perubahan yang dirasakan oleh seseorang atau kelompok terkait pelaksanaan kegiatan atau program yang telah dijalankan. Perubahan nyata dapat berdampak positif, maupun berdampak negatif, tergantung dari proses pelaksanaan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Danim (2004:119) bahwa untuk mengukur efektivitas dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu indikatornya jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil yang dimaksud dapat dilihat dari perbandingan (*ratio*) antara masukan (*input*) dengan keluaran (*output*).

Untuk bisa mengetahui dan mengukur indikator ini, peneliti memfokuskan pada berbagai persepsi dan pandangan masyarakat penerima bantuan PKH, Pendamping PKH dan Tokoh masyarakat yang mengetahui tentang bantuan PKH dan sejauhmana bantuan tersebut dapat membantu kebutuhan peserta PKH sehingga program PKH dapat berdampak dalam perubahan ekonomi dalam masyarakat itu sendiri. Selain itu, untuk mengukur indikator ini juga bisa

dilihat dari tingkat kemiskinan yang ada di Kecamatan Pandak. Kemiskinan menurut Emil Salim (dalam Supriana, 1997:82) mengemukakan lima karakteristik penduduk miskin, yaitu : tidak memiliki faktor produksi sendiri, tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh asset produksi dengan kekuatan sendiri, tingkat pendidikan pada umumnya rendah, banyak diantara mereka yang tidak mempunyai fasilitas, dan diantara mereka berusia bersifat relatif muda dan tidak mempunyai keterampilan atau pendidikan yang memadai.

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan keterangan dengan jelas bahwa bantuan keuangan PKH belum sepenuhnya dapat memberikan sumbangsih yang berarti bagi peserta PKH. Hal ini disebabkan karena skenario bantuan dan atau besaran bantuan yang dirasakan belum adil bagi masing-masing peserta PKH dengan jumlah keanggotaan keluarga yang beragam. Selain itu juga tingkat kemiskinan di Kecamatan Pandak tidak mengalami penurunan bahkan angka kemiskinan di Kecamatan Pandak setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa *output* dari Program Keluarga Harapan berupa bantuan keuangan bagi peserta PKH belum bisa bersinergi dengan upaya pemenuhan kebutuhan peserta PKH dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

Skenario besaran bantuan yang diterapkan selama ini belum mencerminkan adanya keadilan. Sehingga bantuan yang dikucurkan sering menimbulkan kesenjangan antar peserta PKH dengan komposisi anggota rumah tangga dan beban pendidikan yang berbeda-beda. Peserta PKH yang mempunyai anak balita lebih dari satu dan/atau yang mempunyai anak yang masih sekolah dibangku SMP/MTs dan SMA/MAN masih merasakan bahwa jumlah bantuan keuangan PKH belum mencukupi sehingga tidak bisa membantu pemenuhan kebutuhan hidupnya secara signifikan. Sehingga dari sudut pandang indikator ini, Program Keluarga Harapan di Kecamatan Pandak bisa dikatakan tidak efektif.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian data dan pembahasan yang telah diuraikan, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Pandak tidak efektif. Ada beberapa kendala maupun hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan sehingga membuat program ini menjadi tidak efektif. Kendala tersebut diantaranya adalah kurangnya dana untuk memberikan sarana dan prasarana pendukung bagi pelaksana PKH,

kurangnya ketersediaan sumber daya berupa pendamping, tidak adanya mekanisme maupun aturan yang mengharuskan pelaporan penggunaan dana bantuan oleh peserta PKH, semakin menurunnya kepatuhan peserta PKH, *database* penerima bantuan PKH tidak selalu diperbaharui sehingga menyebabkan bantuan PKH kurang tepat sasaran. Padahal pemerintah Kabupaten Bantul ikut membantu dalam memberikan dana yaitu dana dari APBD untuk pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Selain itu, Dinas Sosial Kabupaten Bantul dan Kecamatan Pandak membantu dalam memberikan beberapa fasilitas.

Saran

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang perlu disampaikan untuk meningkatkan atau memperbaiki Program Keluarga Harapan (PKH) agar dapat efektif, khususnya untuk Kecamatan Pandak sebagai berikut:

1. Kementerian Sosial seharusnya membuat anggaran khusus untuk memberikan sarana dan prasarana bagi pelaksana PKH.
2. Kementerian Sosial seharusnya juga melakukan audit sumberdaya, baik pendamping maupun sarana dan prasarana pendukung.
3. Terkait dengan penggunaan bantuan keuangan PKH, Kementerian Sosial

sebaiknya mengeluarkan aturan serta membuat mekanisme kontrol terkait dengan pemanfaatan bantuan.

4. Selanjutnya terkait dengan komitmen kelompok sasaran yang semakin melemah, perlu adanya pengoptimalan fungsi pendamping dan juga peningkatan koordinasi dengan aparat desa setempat.
5. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah desa setempat, baik dalam validasi data, verifikasi data maupun memotivasi kelompok sasaran.
6. Kementerian Sosial seharusnya mampu meningkatkan transparansi terkait data target sasaran penerima PKH sehingga pemerintah desa, masyarakat umum dan *stakeholders* lainnya bisa membantu memonitor perkembangan pelaksanaan PKH sebagai program pengentasan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Miles, M. B dan Hubberman, A Michael. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Purwanto, AE dan Sulistyani, DR. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.

- Remi, Sutyastie Soemitro dan Priyono Tjiptoherijanto. (2002). *Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Robbins, Stephen P. dan Coulter, Mary. (2010). *Manajemen (edisi kesepuluh)*. Jakarta: Erlangga.
- Sedarmayanti. (2001). *Sumber Daya Manusiadan Produktivitas Kerja*. Jakarta: Mandar Maju.
- Moleong, L. J. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno. (2007). *Manajemen Keuangan, Cetakan Kelima*. Yogyakarta: Ekonesia.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Masyarakat.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Peraturan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan secara Non Tunai.
- Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan.
- Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.
- <https://www.kemsos.go.id/program-keluarga-harapan> diakses pada tanggal 27 Januari 2018.
- <http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-i/program-keluarga-harapan-pkh/> diakses pada tanggal 23 November 2017 pukul 21.10 WIB.
- <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/01/02/1413/persentase-penduduk-miskin-september-2017-mencapai-10-12-persen.html> diakses pada tanggal 26 Januari 2018 pukul 21.20 WIB.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
Alamat: Karangmalang Yogyakarta 552281 Telp.586168, Psw : 247, 248, 249

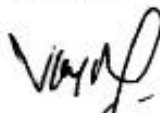
**Formulir Penulisan dan Pengunggahan Artikel *E-Journal* Mahasiswa
Jurusan Ilmu Administrasi Negara**

Nama Mahasiswa	Urika Tri Astari
NIM	14417141068
Judul Tugas Akhir Skripsi	EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL
Nama Dosen Pembimbing	Argo Pambudi, M.Si.
Nama Dosen <i>Reviewer</i>	Sugi Rahayu, M.Pd., M.Si
Tanggal Ujian Skripsi	14 Mei 2018

Yogyakarta, 10 Juli 2018

Menyetujui,

Dosen *Reviewer*


(Sugi Rahayu, M.Pd M.Si.)
NIP. 19540807 1978 2 002

Dosen Pembimbing


(Argo Pambudi, M.Si.)
NIP.19620224 199803 1 001

Pengelola *E-Journal*
Jurusan Ilmu Administrasi Negara


(Pandhu Yurnajaya, MPA.)
NIP. 11510900713614